

Tabel 2.2.2
Daftar SDM Tenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2022

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH	
		L	P	S2	S1	S. MUD	DIPL.	SMA	SMP	SD		
1	Bidang Sekretariat											
	a. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	18	12		9		2	15	4			30
	b. Staf Sub Bagian Perencanaan	3	2		2		2	1				5
2	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial											
	a. Staf Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana	4	1		1		1	3				5
	b. Staf Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga	1	1		1		1	1				2
	c. Staf Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	2	2		3			1				4
4	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin											
	a. Staf Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	1	2		1			2				3
	b. Staf Seksi Penanganan Fakir Miskin	2	2		1			3				4
	c. Staf Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	8	1		2			7				9
5	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial											
	a. Staf Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia	1	4		5							5
	b. Staf Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	1	1					2				2
	c. Staf Seksi Rehabilitasi Tunas Sosial	2	2		2			2				4
6	Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Monumen dan Tugu Perjuangan											
	a. Staf Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Monumen dan Tugu Perjuangan	25	10		1			24	5	5		35
	JUMLAH	68	40		28		6	60	9	5		108

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, sesuai dengan tuntutan tugas dan pelayanan masyarakat memang perlu ditingkatkan dari aspek perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Dukungan sarana perangkat teknologi informasi dan komunikasi ini sangat dibutuhkan antara lain dalam pengelolaan keuangan SKPD dan pengembangan basis data.

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Sosial ditampilkan pada Tabel 2.2.3 di bawah ini.

Tabel 2.2.3
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja
Pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	TANAH				
1	Tanah Bangunan (Bidang)	12 Bidang	✓		
II	PERALATAN DAN MESIN				
1	Station Wagon	2	1		1
2	Sepeda Motor	29	29		
3	Mesin Gergaji	1	1		
4	Mesin Bor	1	1		
5	Mesin Ketik Manual Standar	1	1		
6	Rak Kayu	12	12		
7	Filling Besi / Metal	8	8		
8	Band Kas	2	2		
9	Lemari Kaca	3	3		
10	Lemari Kayu	3	3		
11	Papan Nama Instansi	5	5		
12	Papan Pengumuman	2	2		
13	White Board	5	5		
14	Overhead Projector	3	3		
15	Meja Kayu/Rotan	94	94		
16	Kursi Besi / Metal	4	4		
17	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	9	9		
18	Meja Rapat	25	25		
19	Meja Reseption	1	1		
20	Kursi Rapat	183	154		29
21	Kursi Tamu	6	6		
22	Kursi Putar	12	8		4
23	Meja Komputer	5	5		
24	Moubilier Lainnya	96	96		
25	Mesin Penghisap Debu	2	2		
26	Mesin Potong Rumput	21	19		2
27	Lemari Es	2	2		
28	AC Unit	23	20		3
29	Kipas Angin	3	3		
30	Kompor Gas	2	2		
31	Televisi	6	5		1
32	Sound System	1	1		
33	Wireless	2	2		
34	Dispenser	1	1		
35	Alat Rumah Tangga Lainnya	1 Set	✓		
36	PC Unit	18	15		3
37	Laptop	29	25		4
38	Note Book	1	1		
39	Printer	40	36		4
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	3		1
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	12		3
42	Camera + Attachment	10	10		
43	Microphone/Wireless Mic	2	2		
44	Faximile	3	2		1

III	Gedung dan Bangunan				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	8	8		
2	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	15	15		

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Sesuai dengan tugas dan fungsi, untuk kurun waktu Tahun 2016-2021, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan urusan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain, yaitu:

- a. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2021;
- b. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang disusun setiap tahun.
- c. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) yang disusun setiap tahun.
- d. Buku Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Buleleng Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel T-C.23 berikut ini:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Jumlah Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin Jumlah PMKS penerima sembako,				140 Orang / KK, 148 Desa / Kelurahan	140 Orang / KK, 148 Desa / Kelurahan	140 Orang / KK, 148 Desa / Kelurahan	140 Orang / KK, 148 Desa / Kelurahan	140 Orang / KK, 148 Desa / Kelurahan	140 Orang / KK, 148 Desa / Kelurahan	140 Orang / KK, 148 Desa / Kelurahan	140 Orang / KK, 148 Desa / Kelurahan	100 Orang / KK, 148 Desa / Kelurahan	250 Orang	-	100%	100%	85,71%	89,29%	-
2	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	100%			920 Orang	820 Orang	820 Orang	820 Orang	820 Orang	920 Orang	820 Orang	320 Orang	295 Orang	-	100%	100%	39,02%	35,97%	-	
3	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	100%			591 Orang	530 Orang	530 Orang	530 Orang	530 Orang	561 Orang	645 Orang	288 Orang	18 Orang	-	94,92%	121,69%	54,34%	3,39%	-	
4	Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	100%			860 Anak	620 Anak	720 Anak	820 Anak	920 Anak	830 Anak	635 Anak	135 Anak	77 Anak	-	96,51%	102,42%	18,75%	9,39%	-	
5	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	100%			50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	-	232 Orang	-	100%	100%	0%	464%	-	
6	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan				30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	20 Orang	-	10 Orang	-	100%	66,66%	0%	33,33%	-	
7	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	100%			130 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	130 Orang	150 Orang	135 Orang	140 Orang	-	100%	100%	90%	93,33%	-	
8	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	100%			600 KK / 10 Orang	500 KK / 10 Orang	500 KK / 10 Orang	500 KK / 10 Orang	500 KK / 10 Orang	900 KK / 2 Orang	625 KK / 4 Orang	2.375 KK / 4 Orang	550 KK / 8 Orang	-	85%	82,50%	257,50%	95%	-	

2.4 Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan target Prioritas Nasional, karena berkaitan dengan hak warga negara yang paling minimal harus diterima oleh setiap warga Indonesia, sehingga wajib dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap warganya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di daerah Propinsi dan di daerah kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh dan berhak diperoleh oleh setiap warga negara. Jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota.

Adapun Target Capaian dan Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan Dinas Sosial sesuai Tabel T-C.24 berikut:

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	829.075.000	481.500.000	382.252.200	-	-	825.065.658	477.597.998	381.422.110	-	-	99,52	99,19	99,78	-	-	564.275.733	561.361.922
- Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	93.100.000	82.500.000	184.353.000	-	-	92.396.235	82.331.315	183.776.450	-	-	99,24	99,80	99,69	-	-	119.984.333	119.501.333
- Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	292.500.000	278.200.000	133.839.200	-	-	290.647.261	276.016.690	133.670.660	-	-	99,37	99,22	99,87	-	-	234.846.400	233.444.870
- Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	135.800.000	120.800.000	64.060.000	-	-	135.076.817	119.249.993	63.975.000	-	-	99,47	98,72	99,87	-	-	106.886.667	106.100.603
- Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	307.675.000	-	-	-	-	306.945.345	-	-	-	-	99,76	-	-	-	-	102.558.333	102.315.115
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	546.172.200	578.199.700	190.329.700	-	-	704.674.370	570.706.536	189.507.050	-	-	129,02	98,70	99,57	-	-	438.233.867	488.295.985
- Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	30.000.000	36.300.000	525.000	-	-	29.886.645	36.059.806	522.000	-	-	99,62	99,34	99,43	-	-	22.275.000	22.156.150

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
- Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	20.000.000	24.200.000	828.400	-	-	19.921.605	23.532.591	792.550	-	-	99,61	97,24	95,67	-	-	15.009.467	14.748.915
- Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	89.797.200	83.199.700	-	-	-	251.747.188	82.762.281	-	-	-	280,35	99,47	-	-	-	57.665.633	111.503.156
- Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	406.375.000	434.500.000	147.773.300	-	-	403.118.932	428.351.858	147.019.450	-	-	99,20	98,59	99,49	-	-	329.549.433	326.163.413
- Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak nakal	-	-	41.203.000	-	-	-	-	41.173.050	-	-	-	-	99,93	-	-	13.734.333	13.724.350
Program pembinaan anak terlantar	253.000.000	241.500.300	96.064.900	-	-	89.404.415	240.439.174	95.678.650	-	-	35,34	99,56	99,60	-	-	196.855.067	141.840.746
- Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	253.000.000	217.000.000	96.064.900	-	-	89.404.415	216.047.204	95.678.650	-	-	35,34	99,56	99,60	-	-	188.688.300	133.710.090
- Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	-	24.500.300	-	-	-	-	24.391.970	-	-	-	-	99,56	-	-	-	8.166.767	8.130.657
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	569.500.000	-	-	-	-	565.466.707	-	-	-	-	99,29	-	-	-	-	189.833.333	188.488.902
- Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	101.500.000	-	-	-	-	100.554.812	-	-	-	-	99,07	-	-	-	-	33.833.333	33.518.271

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
- Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	468.000.000	-	-	-	-	464.911.895	-	-	-	-	99,34	-	-	-	-	156.000.000	154.970.632
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	178.500.000	195.000.000	61.348.100	-	-	173.624.685	190.945.122	61.249.050	-	-	97,27	97,92	99,84	-	-	144.949.367	141.939.619
- Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	-	18.100.000	-	-	-	-	17.977.719	-	-	-	-	99,32	-	-	-	6.033.333	5.992.573
- Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	115.500.000	108.900.000	-	-	-	110.786.085	108.079.993	-	-	-	95,92	99,25	-	-	-	74.800.000	72.955.359
- Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo	63.000.000	68.000.000	61.348.100	-	-	62.838.600	64.887.410	61.249.050	-	-	99,74	95,42	99,84	-	-	64.116.033	62.991.687
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	235.500.000	188.600.000	114.728.200	-	-	234.152.860	183.219.768	114.041.150	-	-	99,43	97,15	99,40	-	-	179.609.400	177.137.926
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	91.500.000	55.250.000	22.695.400	-	-	90.497.960	54.252.260	22.638.700	-	-	98,90	98,19	99,75	-	-	56.481.800	55.796.307
- Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	144.000.000	133.350.000	92.032.800	-	-	143.654.900	128.967.508	91.402.450	-	-	99,76	96,71	99,32	-	-	123.127.600	121.341.619
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	577.000.000	226.500.000	96.271.000	-	-	572.011.397	224.077.966	96.200.100	-	-	99,14	98,93	99,93	-	-	299.923.667	297.429.821
- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	90.800.000	90.000.000	46.029.800	-	-	90.485.510	88.719.211	46.012.950	-	-	99,65	98,58	99,96	-	-	75.609.933	75.072.557
- Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	50.000.000	50.000.000	3.680.700	-	-	49.157.985	49.216.952	3.651.500	-	-	98,32	98,43	99,21	-	-	34.560.233	34.008.812

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	100.000.000	86.500.000	46.560.500	-	-	99.066.314	86.141.803	46.535.650	-	-	99,07	99,59	99,95	-	-	77.686.833	77.247.922
- Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	336.200.000	-	-	-	-	333.301.588	-	-	-	-	99,14	-	-	-	-	112.066.667	111.100.529
Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	1.487.649.528	1.382.750.000	932.310.950	-	-	1.473.992.181	1.374.274.077	929.454.248	-	-	99,08	99,39	99,69	-	-	1.267.570.159	1.259.240.169
- Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	475.810.000	467.860.000	158.124.750	-	-	466.202.385	465.800.453	155.894.860	-	-	97,98	99,56	98,59	-	-	367.264.917	362.632.566
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan	258.240.000	157.140.472	75.116.600	-	-	255.280.580	154.906.819	75.093.870	-	-	98,85	98,58	99,97	-	-	163.499.024	161.760.423
- Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	753.599.528	757.749.528	699.069.600	-	-	752.509.216	753.566.805	698.465.518	-	-	99,86	99,45	99,91	-	-	736.806.219	734.847.180
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	267.500.000	844.800.000	645.904.000	-	-	263.408.315	840.615.645	641.221.070	-	-	98,47	99,50	99,27	-	-	586.068.000	581.748.343
- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	267.500.000	210.000.000	341.717.000	-	-	263.408.315	207.560.781	337.306.190	-	-	98,47	98,84	98,71	-	-	273.072.333	269.425.095
- Pemutakhiran data penduduk miskin, (PMKS) dan PSKS lainnya	-	251.500.000	99.223.400	-	-	-	251.015.718	99.158.600	-	-	-	99,81	99,93	-	-	116.907.800	116.724.773
- Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	-	383.300.000	204.963.600	-	-	-	382.039.146	204.756.280	-	-	-	99,67	99,90	-	-	196.087.867	195.598.475
Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	-	569.700.000	222.526.000	-	-	-	559.994.054	221.488.500	-	-	-	98,30	99,53	-	-	264.075.333	260.494.185
- Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	-	101.500.000	30.316.000	-	-	-	96.792.472	30.183.500	-	-	-	95,36	99,56	-	-	43.938.667	42.325.324

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
- Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	-	468.200.000	192.210.000	-	-	-	463.201.582	191.305.000	-	-	-	98,93	99,53	-	-	132.082.000	218.168.861
Program pemberdayaan sosial	-	-	-	964.349.000	1.215.954.359	-	-	-	957.156.124	-	-	-	-	99,25	-	1.090.151.680	478.578.062
Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	-	-	-	964.349.000	1.215.954.359	-	-	-	957.156.124	-	-	-	-	99,25	-	1.090.151.680	478.578.062
- peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	342.789.840	257.795.959	-	-	-	339.382.354	-	-	-	-	99,01	-	120.117.160	169.691.177
- Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	181.089.350	146.600.000	-	-	-	180.873.096	-	-	-	-	99,88	-	65.537.870	90.436.548
- Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	189.720.280	-	-	-	-	188.666.311	-	-	-	-	99,44	-	37.944.056	94.333.156
- Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembaaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	250.749.530	811.558.400	-	-	-	248.234.363	-	-	-	-	99,00	-	212.461.586	124.117.182
Program Rehabilitasi Sosial	-	-	-	952.412.150	1.133.742.211	-	-	-	922.118.965	-	-	-	-	96,82	-	1.043.077.181	461.059.483

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	-	-	-	823.922.150	585.722.213	-	-	-	796.672.548	-	-	-	-	96,69	-	704.822.182	398.336.274
- Penyediaan Permakanan	-	-	-	248.084.150	155.838.982	-	-	-	247.102.476	-	-	-	-	99,60	-	80.784.626	123.551.238
- Penyediaan Alat Bantu	-	-	-	91.030.300	128.860.545	-	-	-	89.873.358	-	-	-	-	98,73	-	43.978.169	44.936.679
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	-	-	-	145.506.000	133.259.603	-	-	-	141.463.103	-	-	-	-	97,22	-	55.753.121	70.731.552
- Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	-	-	-	339.301.700	167.763.083	-	-	-	318.233.611	-	-	-	-	93,79	-	101.412.957	159.116.806
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV /IADS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-	128.490.000	548.019.998	-	-	-	125.446.417	-	-	-	-	97,63	-	338.254.999	62.723.209
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	-	34.905.900	386.660.190	-	-	-	34.676.944	-	-	-	-	99,34	-	84.313.218	17.338.472
- Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA	-	-	-	93.584.100	161.359.808	-	-	-	90.769.473	-	-	-	-	96,99	-	50.988.782	45.384.737

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	175.129.780	337.001.066	-	-	-	170.127.802	-	-	-	-	97,14	-	256.065.423	85.063.901
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	175.129.780	337.001.066	-	-	-	170.127.802	-	-	-	-	97,14	-	256.065.423	56.709.267
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	175.129.780	139.201.120	-	-	-	170.127.802	-	-	-	-	97,14	-	62.866.180	85.063.901
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				-	197.799.946				-	-	-	-	-	-	-	98.899.973	-
Program Penanganan Bencana	-	-	-	319.497.360	266.072.494	-	-	-	294.731.024	-	-	-	-	92,25	-	292.784.927	147.365.512
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	319.497.360	266.072.494	-	-	-	294.731.024	-	-	-	-	92,25	-	292.784.927	147.365.512
- Penyediaan Makanan	-	-	-	319.497.360	266.072.494	-	-	-	294.731.024	-	-	-	-	92,25	-	117.113.971	147.365.512

Uraian (1)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	-	816.230.670	1.319.069.495	-	-	-	801.060.416	-	-	-	-	98,14	-	1.067.650.083	400.530.208
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	816.230.670	1.319.069.495	-	-	-	801.060.416	-	-	-	-	98,14	-	1.067.650.083	400.530.208
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	46.347.900	503.460.910	-	-	-	44.872.262	-	-	-	-	96,82	-	109.961.762	22.436.131
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	693.961.765	721.524.367	-	-	-	682.591.881	-	-	-	-	98,36	-	283.097.226	341.295.941
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	75.921.005	94.084.218	-	-	-	73.596.273	-	-	-	-	96,94	-	34.001.045	36.798.137

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan perannya, tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu antar Perangkat Daerah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Tantangan dan hambatan dalam upaya upaya pencapaian tujuan dan sasaran pasti selalu ada, namun demikian di sisi lain peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu:

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
- b. Meningkatnya pembiayaan pembangunan daerah sehingga tidak lagi hanya dapat bertumpu pada pemerintah melainkan adanya kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private-citizen partnership*)
- c. Meningkatnya kebutuhan terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan pembangunan dengan dukungan perangkat jaringan informasi pembangunan yang memadai.
- d. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pemahaman keluarga dan masyarakat.
- e. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat akibat adanya dampak pandemi Covid-19.
- f. Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat serius terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mengandalkan pariwisata, sehingga terjadi keterbatasan sumber dana untuk mendukung program pembangunan kesejahteraan sosial.
- g. Belum adanya harmonisasi kebijakan antar instansi terkait dan stakeholder lainnya
- h. Perubahan iklim dan alam seperti pandemi covid-19 yang mempengaruhi kerentanan masyarakat termasuk bencana rawan pangan.
- i. Dunia usaha belum sepenuhnya mengakomodasi tenaga kerja dari PMKS.
- j. Belum maksimalnya kinerja PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a. Semakin intensifnya pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- b. Semakin meningkatnya trend partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan sosial.
- c. Peran aktif masyarakat dan swasta membantu Pemerintah dalam mendukung pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Penanggulangan kemiskinan menjadi kebijakan prioritas.
- f. Terjaganya keamanan dan stabilitas masyarakat, sehingga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng antara lain:

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang urusan sosial.
2. Belum sempurnanya basis data pendukung perencanaan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan program dan kegiatan.
3. Belum maksimalnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng.

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah :

1. Belum optimalnya berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, seperti; lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan urusan sosial;
2. Belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan dengan Provinsi, dan swasta serta masyarakat.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat aparat desa dalam memberikan data terkait peningkatan kesejahteraan sosial.
4. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial.
5. Masih tingginya penduduk miskin di Kabupaten Buleleng.

Kedepannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng diharapkan lebih mengimplementasikan inovasi yang harus dibuat, inovatif, responsif, kreatif untuk mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan bidang sosial yang berkualitas. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, pemantapan kelembagaan perencanaan di tingkat dasar, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng

Tahapan dan prioritas pembangunan merupakan agenda prioritas yang harus diselesaikan pada rencana pembangunan jangka menengah sehingga Dalam penyusunan Renstra 2023-2026 Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menggunakan Visi Misi RPJPD (2005-2025),

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

**“Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya
berlandaskan Tri Hita Karana“**

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera, mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng bisa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali. Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berdasarkan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh Nilai-nilai Hindu. Filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diwujudkan dengan melaksanakan lima misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 5 (Lima) misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang

berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.

2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat system keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsive terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan dan aktivitas budaya.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Dari 5 (lima) misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diatas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengampu misi ke-2 (dua) yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.”

Sedangkan sasaran yang diampu adalah sasaran 2:

“ Terwujudnya masyarakat Buleleng yang sejahtera”

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bali

3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Sosial RI

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah membantu mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan merupakan Visi Pembangunan Nasional (Presiden), yaitu:

‘Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Gotong-royong merupakan salah satu ciri dan kepribadian bangsa yang melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial. Kepribadian harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, khususnya dalam pengembangan nilai-nilai budaya dan sosial yang merupakan modal sosial bagi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai lokal yang menjiwai semangat gotong royong. Nilai-nilai lokal ini melekat dalam sistem sosial masyarakat yang mencakup; keluarga, lembaga sosial masyarakat, dan pranata sosial.

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Sosial Provinsi Bali

Gambaran nyata tentang visi dan misi Provinsi Bali dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023 dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah

kebijakan RPJPD pada periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami peningkatan melalui berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani.

1. Visi

Visi Provinsi Bali merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2018-2023. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, yakni menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan Krama Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berpendidikan dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpolo, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai NKRI.”

2. Misi

Perwujudan visi pembangunan Provinsi Bali jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Untuk mewujudkan Visi di atas, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Provinsi Bali 2018-2023”, sebagai berikut:

- (1) Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
- (2) Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- (3) Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis Kecamatan.
- (4) Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
- (5) Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
- (6) Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.

- (7) Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
- (8) Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
- (9) Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
- (10) Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
- (11) Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- (12) Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*.
- (13) Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota se-Bali.
- (14) Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan luar negeri secara bersinergi antar Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
- (15) Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
- (16) Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
- (17) Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (*branding Bali*) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
- (18) Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
- (19) Mengembangkan sistem kemanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.

- (20) Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
- (21) Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang hijau, indah, dan bersih.
- (22) Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Berdasarkan misi Gubernur Bali diatas, Dinas Sosial Provinsi Bali berperan serta dalam pencapaian misi ke 1 (satu) dan ke 7 (tujuh) yaitu: “Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali” dan “Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh berkembang sampai akhir masa kehidupannya”.

Arah kebijakan dan program pembangunan Gubernur Bali yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan papan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali melalui penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan penyediaan sandang bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sedangkan pada arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan jaminan sosial, Dinas Sosial berperan dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya sesuai dengan program Gubernur Bali yang menitikberatkan pada penyandang disabilitas permanen dan lanjut usia.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sosial dalam penentuan isu-isu strategis diantaranya:

Penyelenggaraan kesejahteraan social merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun penyelenggaraan kesejahteraan social bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi didalamnya jauh sangat kompleks. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sebagian besar diantar mereka merupakan masyarakat miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Perencanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang sosial, hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan

konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas hasil pembangunan menjadi lebih baik, sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi, Kabupaten Buleleng pada tahun 2017-2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum optimalnya sumber daya manusia perencana pembangunan daerah dibidang sosial.
- 2) Kurang validnya data pendukung perencanaan pembangunan dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- 3) Masih kurangnya perhatian terhadap masalah Lanjut Usia/LANSIA.
- 4) Belum optimalnya bantuan terhadap penyandang Disabilitas.
- 5) Belum optimalnya bantuan terhadap Anak terlantar
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu pengentasan Gepeng
- 7) Masih terbatasnya bantuan terhadap pemulihan korban pasca bencana.
- 8) Masih kurangnya sosialisasi Permensos RI No. 83/HUK/2005 terkait Karang Taruna.
- 9) Masih kurangnya fasilitas pembinaan Panti Asuhan, mengingat penghuni Panti Asuhan cukup banyak, sehingga membutuhkan pasokan pangan yang lebih banyak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023 - 2026.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu 2023-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

b. Sasaran

1. Menurunnya Penduduk Miskin
2. Meningkatnya Penanganan PMKS

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disajikan pada Tabel T-C. 25

TABEL T.C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA SASARAN				KONDISI AKHIR (2026)
						2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
1	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Persentase penduduk miskin	1 Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,90	4,80	4,60	4,60
			2 Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86

Catatan :

- Persentase penanganan PMKS: dalam menentukan target kinerja sasaran kita mengakumulasi target 3 persen pertahun.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi. Untuk mendukung strategi jangka menengah dinas, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun pembangunan. Strategi dan Arah Kebijakan yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel T.C. 26.

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	1 Menurunnya penduduk miskin	1 Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	1 Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial
		2 Meningkatnya Penanganan PMKS	2 Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS	2 Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya Penduduk Miskin
2. Meningkatnya Penanganan PMKS

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Indikasi Rencana Program disertai kebutuhan pendanaan Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.27.

TABEL T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TAHUN 2026		UNIT KERJA SKPD			
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	RP		TARGET	RP	
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19			
Meningkatnya Penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial		1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
		1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			10.268.000.000		10.096.000.000		10.460.000.000		10.925.000.000		41.749.000.000	Dinas Sosial			
		1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100 %	5.510.000.000	100 %	5.710.000.000	100 %	5.710.000.000	100 %	5.725.000.000	100 %	22.655.000.000			
		1	06	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	100 %	219.000.000	100 %	220.000.000	100 %	220.000.000	100 %	220.000.000	100 %	879.000.000		
		1	06	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	14 dokumen	89.000.000	14 dokumen	90.000.000	14 dokumen	90.000.000	14 dokumen	90.000.000	14 dokumen	359.000.000	
		1	06	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 laporan	130.000.000	8 laporan	130.000.000	8 laporan	130.000.000	8 laporan	130.000.000	8 laporan	520.000.000	
		1	06	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	4.493.000.000	100 %	4.520.000.000	100 %	4.520.000.000	100 %	4.520.000.000	100 %	18.053.000.000		
		1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn	29 orang	3.928.000.000	29 orang	3.955.000.000	29 orang	3.955.000.000	29 orang	3.955.000.000	29 orang	15.793.000.000	
		1	06	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminitrasi tugas asn	12 dokumen	349.000.000	12 dokumen	349.000.000	12 dokumen	349.000.000	12 dokumen	349.000.000	12 dokumen	1.396.000.000	
		1	06	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan	12 dokumen	216.000.000	12 dokumen	216.000.000	12 dokumen	216.000.000	12 dokumen	216.000.000	12 dokumen	864.000.000	
		1	06	01	2,05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	5.000.000	-	-	-	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	45.000.000	
		1	06	01	2,05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan					30 paket	15.000.000	30 paket	15.000.000	30 paket	30.000.000	
		1	06	01	2,05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	1 orang	5.000.000			1 orang	5.000.000	1 orang	5.000.000	4 orang	15.000.000	
		1	06	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	116.000.000	100 %	102.000.000	100 %	111.000.000	100 %	126.000.000	100 %	455.000.000		
		1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	17.000.000	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	12 paket	15.000.000	12 paket	62.000.000	
		1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000			1 paket	9.000.000	1 paket	6.000.000	1 paket	30.000.000	
		1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	57.000.000	2 paket	57.000.000	2 paket	57.000.000	2 paket	60.000.000	2 paket	231.000.000	
		1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	12.000.000	2 paket	15.000.000	2 paket	15.000.000	2 paket	15.000.000	2 paket	57.000.000	
		1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	75.000.000	
		1	06	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	652.000.000	100 %	781.000.000	100 %	752.000.000	100 %	752.000.000	100 %	2.937.000.000		
	1	06	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	57.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	267.000.000		
	1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	182.000.000	12 Laporan	211.000.000	12 Laporan	182.000.000	12 Laporan	182.000.000	12 Laporan	757.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD									
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		RENSTRA TAHUN 2026													
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP										
1	2	3			4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19								
		1	06	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		12	Laporan	217.000.000	12	Laporan	230.000.000	12	Laporan	230.000.000	12	Laporan	230.000.000	12	Laporan	907.000.000			
		1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12	Laporan	196.000.000	12	Laporan	270.000.000	12	Laporan	270.000.000	12	Laporan	270.000.000	12	Laporan	1.006.000.000			
		1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100	%	25.000.000	100	%	87.000.000	100	%	87.000.000	100	%	87.000.000	100	%	286.000.000			
		1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perijinannya.		12	Unit	10.000.000	12	Unit	52.000.000	12	Unit	52.000.000	12	Unit	52.000.000	12	Unit	166.000.000			
		1	06	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		1	Unit	10.000.000	1	unit	30.000.000	1	unit	30.000.000	1	unit	30.000.000	4	unit	100.000.000			
		1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1	Unit	5.000.000	1	Unit	5.000.000	1	Unit	5.000.000	1	Unit	5.000.000	4	unit	20.000.000			
	Menurunkan Penduduk miskin	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80	%	80	%	1.750.000.000	80	%	1.300.000.000	80	%	1.300.000.000	80	%	1.600.000.000	80	%	5.950.000.000		
		1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80	%	80	%	1.750.000.000	80	%	1.300.000.000	80	%	1.300.000.000	80	%	1.600.000.000	80	%	5.950.000.000		
		1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota		148	orang	200.000.000	148	orang	200.000.000	148	orang	200.000.000	148	orang	200.000.000	148	orang	800.000.000			
		1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		9	orang	114.660.000	9	orang	114.660.000	9	orang	114.660.000	9	orang	114.660.000	9	orang	458.640.000			
		1	06	02	2,03	03	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		100	keluarga	80.000.000	100	keluarga	80.000.000	100	keluarga	80.000.000	100	keluarga	80.000.000	400	keluarga	320.000.000			
		1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		7, 17	Lembaga, LKS	1.355.340.000	6, 17	lembaga	905.340.000	7, 17	lembaga	905.340.000	6, 17	lembaga	1.205.340.000	6, 17	lembaga	4.371.360.000			
		Meningkatnya penanganan PMKS	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3,86	%	6,86	%	1.210.000.000	9,86	%	1.250.000.000	12,86	%	1.500.000.000	15,86	%	1.500.000.000	15,86	%	5.460.000.000	
			1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial.		1,5	%	800.000.000	1,5	%	860.000.000	1,5	%	1.100.000.000	1,5	%	1.100.000.000	6	%	3.860.000.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD
						TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		RENSTRA TAHUN 2026		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
		1 06 04 2,01 01	Penyediaan Permakanan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota		400 Orang	230.000.000	400 Orang	250.000.000	400 Orang	250.000.000	400 Orang	250.000.000	1600 Orang	980.000.000	
		1 06 04 2,01 03	Penyediaan Alat Bantu	jumlah orang yang mendapat alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota		30 Orang	130.000.000	30 Orang	120.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000	120 Orang	550.000.000	
		1 06 04 2,01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota		100 Orang	110.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	110.000.000	100 Orang	110.000.000	400 Orang	440.000.000	
		1 06 04 2,01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota		100 orang	100.000.000	100 orang	120.000.000	100 orang	220.000.000	100 orang	220.000.000	400 orang	660.000.000	
		1 06 04 2,01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota		400 Orang	230.000.000	400 Orang	260.000.000	400 Orang	370.000.000	400 Orang	370.000.000	1600 Orang	1.230.000.000	
		1 06 04 2,02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza di luar pantli sosial yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial		1,5 %	410.000.000	1,5 %	390.000.000	1,5 %	400.000.000	1,5 %	400.000.000	6 %	1.600.000.000	
		1 06 04 2,02 02	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota		15 orang	80.000.000	15 orang	50.000.000	15 orang	50.000.000	15 orang	50.000.000	60 orang	230.000.000	
		1 06 04 2,02 03	Penyediaan permakanan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota		200 orang	100.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	100.000.000	800 orang	400.000.000	
		1 06 04 2,02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota		100 Orang	230.000.000	100 Orang	240.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	250.000.000	400 Orang	970.000.000	
	Menurunkan Penduduk miskin	1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100 %	100 %	346.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	100 %	1.546.000.000	
		1 06 05 2,02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin		100 %	346.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	450.000.000	100 %	1.546.000.000	
		1 06 05 2,02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		4000 orang	160.000.000	4000 orang	162.000.000	4000 orang	210.000.000	4000 orang	250.000.000	4000 orang	782.000.000	
		1 06 05 2,02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota		500 keluarga	186.000.000	500 keluarga	188.000.000	500 keluarga	190.000.000	500 keluarga	200.000.000	2000 keluarga	764.000.000	
		1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	266.000.000	100 %	300.000.000	100 %	350.000.000	100 %	400.000.000	100 %	1.316.000.000	
		1 06 06 2,01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial		100 %	241.000.000	100 %	275.000.000	100 %	320.000.000	100 %	370.000.000	100 %	1.206.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2022	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA SKPD	
									TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		RENSTRA TAHUN 2026			
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	
		1	06	06	2,01	04	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten /kota		450 orang	241.000.000	450 orang	275.000.000	450 orang	320.000.000	450 orang	370.000.000	1800 orang	1.206.000.000	
		1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana		100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	110.000.000	
		1	06	06	2,02	02	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota		50 orang	25.000.000	50 orang	25.000.000	50 orang	30.000.000	50 orang	30.000.000	200 orang	110.000.000	
		1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	93,33 %	100 %	1.186.000.000	100 %	1.186.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.250.000.000	100 %	4.822.000.000	
		1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman makam pahlawan dan nilai kepahlawanan		100 %	1.186.000.000	100 %	1.186.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.250.000.000	100 %	4.822.000.000	
		1	06	07	2,01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana taman makam pahlawan nasional kewenangan kabupaten/kota		1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	1.400.000.000	
		1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		1 makam	730.000.000	1 makam	730.000.000	1 makam	744.000.000	1 makam	794.000.000	1 makam	2.998.000.000	
		1	06	07	2,01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pengamanan pada taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota		1 Laporan	106.000.000	1 Laporan	106.000.000	1 Laporan	106.000.000	1 Laporan	106.000.000	1 laporan	424.000.000	
										10.268.000.000		10.096.000.000		10.460.000.000		10.925.000.000		41.749.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian kinerja dari tugas pokok dan fungsi serta isu-isu strategis dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada Tabel T-C.28

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Kinerja Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
		(Tahun 2021)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase penduduk miskin	6,12	5,15	4,90	4,80	4,60	4,60
2	Persentase penanganan PMKS	3,86	6,86	9,86	12,86	15,86	15,86

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial untuk 4 (empat) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan semua kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dapat berjalan secara terukur dan terarah. Pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Setelah selesainya penyusunan Renstra ini segera akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai acuan kerja dalam mewujudkan Renstra melalui tahapan perencanaan setiap tahunnya. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur indikator keberhasilan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Badung dalam empat tahun kedepan. Kritik dan saran semua pihak sangat dihargai, demi penyempurnaan penyusunan Renstra dimasa mendatang.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, 



I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053